BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses pergantian perilaku sikap seorang lewat proses pembelajaran. Hak guna menemukan Pembelajaran untuk tiap masyarakat negeri Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Setelah itu ditegaskan kembali dalam Undang- undang No 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 jika "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu." Negara menjamin hak Pendidikan untuk warganya guna mendapat pendidikan yang layak serta bermutu demi mensejahterakan diri serta negaranya tanpa didasarkan oleh gender, umur, serta latar balik ekonomi, sosial ataupun budaya.

Pendidikan pula menggambarkan proses penyadaran ataupun conscientization. Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan Kaum tertindas (2008) memaparkan jika Pendidikan yakni usaha guna mengembalikan peranan pendidikan selaku alat yang melepaskan manusia dari bermacam wujud penindasan serta ketertindasan. Pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan kenyataan diri manusia serta dirinya sendiri.¹

Pendidikan di Indonesia memiliki 3 jalur yang saling melengkapi dan berperan penting bagi kehidupan, menurut Undang – Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Bab VI tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya". Pendidikan pada hakikatnya dimulai dari jalan pendidikan informal yang merujuk pada kegiatan pembelajaran keluarga serta lingkungan. Setelah itu kala pada umur tertentu, seorang hendak merambah pendidikan formal yang merujuk pada pendidikan di

.

¹ Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, LP3ES, 2008

sekolah ataupun perguruan tinggi, tetapi Pendidikan formal dibatasi oleh umur peserta didik. Kemudian pada Pendidikan non- formal selain sebagai pengganti Pendidikan formal serta pelengkap informal, juga berupaya menerapkan pelayanan dalam penuhi tuntutan kebutuhan pembelajaran warga yang lumayan kompleks.

Dalam kehidupannya Masyarakat pasti memiliki permasalahan sosial, di mana harapan dengan kenyataan berbeda antara yang seharusnya dan yang terjadi saat ini. Hadirnya Pendidikan Nonformal mampu menjadi angin segar dalam memecahkan permasalahan sosial tersebut, sebab Pendidikan Nonformal merupakan pengganti, penambah, serta/ ataupun pelengkap pendidikan formal serta informal guna menolong pemecahan permasalahan sosial dan dalam rangka menunjang pendidikan selama hayat.

Pendidikan Non-formal terdiri dari beberapa macam, dalam Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa:

"Program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup (life skill), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik."

Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki ranah Pendidikan pemberdayaan bagi perempuan. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah Pendidikan yang ditujukan untuk perempuan yang berupaya dalam pengembangan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.

Institut KAPAL Perempuan mempunyai visi ialah terciptanya masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang kuat guna memesatkan terciptanya masyarakat yang mempunyai daya pikir kritis, solidaritas, berkeadilan gender, pluralis, transparan serta anti kekerasan. Salah satu Misinya merupakan Meningkatkan pendidikan kritis feminis

dengan bermacam isu strategis yang diperuntukan kepada masyarakat, khususnya aktivis gerakan perempuan serta sosial dan pemimpin-pemimpin wanita marginal. Institut KAPAL Wanita bertujuan buat menguatkan Gerakan wanita serta Gerakan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan serta keadilan gender dan perdamaian di ranah publik serta privat. Kantor Pusat Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan terletak di Kalibata Timur Raya, Pancoran, Jakarta Selatan.

Institut KAPAL Perempuan memiliki kegiatan utama diantaranya;

- 1. Pengembangan Resource Center (Knowledge Development).
- 2. Pendidikan Feminis untuk kesetaraan dan Perdamaian.
- 3. Advokasi berbasis data dengan perspektif feminisme dan pluralisme.
- 4. Pengembangan institusi dan jaringan.

Program-program tersebut diaplikasikan di dalam **Sekolah Perempuan** guna memberdayakan perempuan Indonesia dengan meningkatkan integritas dan kemampuan kelompok perempuan.

Sekolah perempuan diinisiasi oleh Institut KAPAL Perempuan pada tahun 2000 hingga saat ini dan sudah menyebar di berbagai wilayah dan provinsi. Sekolah perempuan adalah wadah pembelajaran dan mengelola pengetahuan perempuan yang utamanya dikembangkan di komunitas-komunitas miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan kepulauan terpencil.

Program sekolah perempuan yang berfokus pada bidang pendidikannya merupakan Pendidikan Feminis. Pendidikan feminis merupakan menyusun konsep serta metodologi pendidikan guna perempuan, menyelenggarakan *training- training*, pengorganisasian serta meningkatkan perlengkapan monitoring serta penilaian berperspektif gender serta komunitas.

Semenjak berdiri, KAPAL Perempuan sudah menyelenggarakan training untuk pemimpin perempuan di tingkatan lokal di bermacam daerah di Indonesia, perempuan miskin kota, perempuan perdesaan serta pulau terpencil, daerah konflik serta bencana dan buruh perempuan di zona industri, pekerja rumah tangga migran serta dalam negeri. Training tersebut disesuaikan dengan kebutuhan wanita serta mengintegrasikan dengan bermacam isu, misalnya isu daerah, penghindaran konflik serta pembangunan perdamaian(pluralisme), seksualitas, kemiskinan serta kesehatan reproduksi.²

Pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan di sekolah perempuan disesuaikan dengan kebutuhan perempuan setempat dan berintegrasi dengan berbagai isu. Seperti sekolah perempuan yang berada di Jakarta ialah Sekolah Perempuan Kelurahan Jatinegara Kaum, Sekolah perempuan yang terdapat di kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur terdiri dari 9 (sembilan) Kelompok tingkat RW. Anggota Sekolah Perempuan berjumlah 363 orang dan 13 orang anggota Sekolah Perempuan tingkat kelurahan (ketua).

Kelurahan Jatinegara Kaum merupakan lingkungan padat penduduk yang masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai karyawan swasta dan pedagang. Rumah-rumah mereka saling berdekatan hanya disekat oleh jalan setapak dan gang-gang sempit, para istri di lingkungan tersebut mayoritas tidak bekerja, hanya Ibu Rumah Tangga (IRT).

Menurut Ema sebagai pengurus sekolah perempuan di daerah Jakarta, Daerah Jatinegara Kaum termasuk daerah padat penduduk dengan wilayah yang sempit, dan masih banyak terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), apalagi semenjak pandemi banyak keluarga yang memiliki masalah kehidupan rumah tangga akibat dampak pandemi yang mengharuskan untuk tetap di rumah saja dan makin memperparah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Jatinegara Kaum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang dilindungi oleh negara. Menurut UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang

² kapalperempuan.org

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"



1 dari 3 perempuan usia 15-64 Indonesia mengalami **kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka**.

Sekitar **1 dari 10** perempuan mengalaminya dalam **12 bulan terakhir**



(2016)



Perempuan korban tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 259.150 (2016)

Sumber: SPHPN 2016, Survei ICRW 2018, KPPPA 2017

Gambar 1: Jumlah kekerasan yang dialami perempuan (data KPPPA 2017)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah masalah lama yang belum terpecahkan karena dianggap aib dan perlu ditutupi dari masyarakat. Seperti gambar di atas, berdasarkan Sumber ICRW 2018, KPPPA 2017 menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun di Indonesia, pada tahun 2017 mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka.

Terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 di Indonesia, berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) KOMNAS Perempuan melalui dinamika pengaduan langsung ke KOMNAS Perempuan dan lembaga layanan dan Badilag terkumpul berjumlah 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan

rincian; pengaduan ke KOMNAS Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus.³

Besarnya angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus. Kemudian pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Peningkatan secara drastis terjadi pada data BADILAG sebesar 52% yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020).

Bersumber dari catatan LBH APIK Jakarta, catatan pengaduan kekerasan seksual pada tahun 2019 sejumlah 794 kasus, pada tahun 2020 sejumlah 1.178 kasus, dan pada tahun 2021 hingga Oktober meningkat sejumlah 1.321 kasus. Dari 1.321 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta sejumlah 489 kasus yaitu KBGO, 374 KDRT, tindak pidana umum 81, kekerasan dalam pacaran (KDP) 73, serta tindakan kekerasan seksual pada perempuan dewasa sejumlah 66. Selebihnya adalah kasus pelecehan seksual di tempat umum, serta kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak.⁴

Berdasarkan data di *Medcom.id* yang menunjukkan data kasus kekerasan terhadap perempuan pada bulan Maret 2021 terdapat 8.234 kasus. sebesar 79% terdapat dalam ranah personal atau KDRT. Namun korban yang melapor 1.404 kasus saja. Diduga akibat budaya patriarki yang menempatkan laki-laki memegang posisi lebih sentral di dalam rumah tangga disebut sebagai akar KDRT.⁵

Peluang penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki banyak faktor, salah satunya budaya patriarki. Budaya patriarki sudah mengakar sejak zaman dahulu, di mana pola hubungan di dalam keluarga yang memposisikan suami sebgai penguasaa (ketua) yang bertugas untuk melindungi yang lemah dan mengatur apapun tehdap

⁴ https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211210211057-20-732722/lbh-apik-kasus-kekerasan-seksual-meningkat-dominan-kbgo-kdrt. diakses 26 Maret 2022

.

https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan diakses 29 Maret 2022

⁵ https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ybDX96mb-kasus-kdrt-meningkat-selama-2021 . diakses 26 Maret 2022

keluarga. Isrti hanya pengikut dan dan penerima perintah saja, bahkan dipandang lemah. Salah satu filsuf terkenal Friedrich Nietzsche mengatakan "Perempuan mempunyai mentalitas budak maka sebaiknya memang perempuan melayani suaminya" disampaikan oleh Budhis Utami wakil direktur Institut KAPAL Perempuan dalam kuliah umum LKM UNJ.

Kemudian salah satu penyebabnya lagi adalah faktor ekonomi keluarga yang dapat memicu perselisihan di antara keluarga. Apalagi sejak adanya pandemi COVID-19 tentu berdampak terhadap semua bidang di Indonesia diantaranya bidang pertahanan, pendidikan, khususnya bidang ekonomi. Pandemi membuat semua kegiatan sehari-hari menjadi terhenti karena adanya keputusan untuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), hal tersebut berdampak pula pada ekonomi rakyat. Banyak pengangguran baru bermunculan karena terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran, ditambah setiap tahunnya jumlah pencari kerja bertambah karena jumlah kelulusan juga bertambah.

Kemiskinan semakin bertambah karena ekonomi Indonesia menurun, kemudian semua kegiatan pendidikan dirumahkan, maka anak sekolah, dan kuliah pasti membutuhkan perangkat seperti gawai ataupun laptop serta kuota internetnya untuk mengakses tersebut. Tentu dengan adanya tuntutan seperti ini dapat menekan pembiayaan bagi keluarga, belum lagi jika kepala keluarga terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik.

Atnike Nova Sigiro menuliskan dalam Jurnal Perempuan yang bertajuk Women and The Covid-19 Pandemic bahwa adanya pandemi Covid-19 menambah kerentanan bagi perempuan terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

UN Women's Rapid Gender Assessment (RGA) in Europe and Central Asia found more than 15 percent of women have lost their jobs, 41 percent of women have experienced wage's cut, and found the increasing hour and workload of women in the family during the Covid-19 pandemic. Not only causing economic and social impacts, the Covid-19 pandemic has also caused increasing women's vulnerability to domestic violence. Shadow pandemic is a concept that explains the phenomenon of the increased prevalence of violence against women during the Covid-19 pandemic⁶.

Pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya kerentanan perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bayang-bayang pandemi menjadi konsep yang menjelaskan fenomena meningktanya prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) selama pandemi Covid-19.

Peningkatan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama pandemi ini sudah diantisipasi oleh pihak sekolah perempuan dengan pemberian pendidikan feminis dan pelayanan advokasi kepada masyarakat Jatinegara Kaum sejak tahun 2015.

Pendidikan feminis terbagi menjadi beberapa program, program Pendidikan Adil Gender adalah program yang dikhususkan bagi perempuan untuk mengenal dan menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Program ini sebagai bentuk pencegahan kasus KDRT dalam keluarga. Pemberdayaan perempuan melalui Pendidikan feminis adalah program Pendidikan Nonformal yang dibuat sebagai bentuk Pendidikan Nasional dengan konsep Pendidikan sepanjang hayat.

Melalui Pendidikan Adil Gender yang merupakan program Pendidikan feminis yang dilakukan oleh Institut KAPAL Perempuan (Lingkaran Pendidikan untuk Perempuan) diharapkan dapat membangun kesadaran kritis bagi para perempuan. Konsep dan Metodologi Pendidikan Adil Gender untuk Membangun Kepemimpinan Perempuan yang mengintegrasikan tiga hal yaitu kesadaran kritis, kecakapan hidup serta advokasi dan pengorganisasian di komunitas.⁷

Pendidikan Adil Gender yang dibentuk oleh Institut KAPAL Perempuan bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai

.

⁶ Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 4, November 2020. Women and The Covid-19 Pandemic, Atnike Nova Sigiro. Diunduh 19 Oktober 2021

⁷ Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa, KOMPAK. diunduh 20 Oktober 2021

kesetaraan gender, di mana terdapat materi mengenai mengurangi dampak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di dalamnya. Hal tersebut merupakan bentuk peran Pendidikan Nonformal sebagai bentuk pemberdayaan perempuan berkelanjutan dari Lembaga swadaya masyarakat. Pendidikan adil gender penting dalam membangun kesadaran bagi perempuan khususnya para istri tidak lagi menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga, namun perampasan hak dan kekerasan yang perlu dilaporkan ke pihak yang dapat melindungi dan menangani hal tersebut juga dilindungi oleh hukum dan negara.

Masyarakat Jatinegara Kaum kini sudah memiliki kesadaran akan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, istri sudah berani untuk bercerita dan mengadu kepada pengurus sekolah perempuan Jatinegara Kaum. Dengan adanya Pendidikan feminis yang dilakukan oleh sekolah perempuan kepada masyarakat jatinegara kaum dapat merubah pola pikir masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang awalnya menjadi urusan suami dan istri, kini menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut serta dalam mencegah dan mengawasi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Sri Mulyati sebagai kordinator advokasi pengurus sekolah perempuan di Jakarta menceritakan bahwa masyarakat atau para istri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lebih berani mengadu atau bercerita kepada pihak KAPAL perempuan dibanding dengan pihak pengaduan yang disediakan oleh Kelurahan yaitu LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia). "Karena kalau mengadu ke LBH APIK itu kan harus dicatat nama-namanya kemudian baru dipanggil dan lama juga, hal-hal tersebut yang membuat masyarakat sini tuh lebih suka melapor ke KAPAL Perempuan. Karena mereka juga pasti kan malu kalau namanya dicatat gitu, semua orang jadi tahu kalau dia jadi korban kekerasan. Bahkan dari LBH APIK pun aja bertanya sama kami 'emang ada ya kasus KDRT di sini?' saya bilang lah banyak banget," ungkap Sri Mulyati.

Berdasarkan kondisi dan pernyataan yang diungkapkan Sri Mulyati sebagai kordinator advokasi sekolah perempuan di Jakarta bahwa masyarakat Jatinegara Kaum sudah sadar dan memiliki keinginan belajar mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan cara menangani serta pencegahannya lewat Pendidikan adil gender yang diadakan oleh sekolah perempuan Institut KAPAL Perempuan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Program Pendidikan Feminis Bagi Para Perempuan di Kelurahan Jatinegara Kaum (Studi di Institut KAPAL Perempuan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka hal yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah Implementasi pendidikan feminis yang dilakukan Institut KAPAL Perempuan dalam mencegah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kelurahan Jatinegara Kaum, kecamatan Pulo gadung, Jakarta Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana:

- Pelaksanaan pendidikan feminis yang dilakukan Institut KAPAL
 Perempuan melalui sekolah perempuan dalam mencegah tindak
 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Jatinegara
 Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- Tanggapan warga sekitar dan keluarga peserta didik terhadap pendidikan feminis yang dilakukan Institut KAPAL Perempuan melalui sekolah perempuan dalam mencegah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan:

- a. Tentang tahapan pelaksanaan pendidikan feminis bagi perempuan dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Tentang cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan pendidikan feminis bagi perempuan dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, seperti yang dipaparkan berikut ini:

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta kemampuan keilmuan dalam menyelenggarakan Pendidikan feminis bagi perempuan dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

b. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah kajian mengenai Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan bagi perempuan dalam mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Sekolah Perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memacu penelitian lain yang lebih baik terkait mengkaji persoalan pemberdayaan perempuan.

c. Bagi Penyelenggara

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sebagai pengurus sekolah perempuan dalam mengelola program Pendidikan feminis bagi perempuan melalui sekolah perempuan

